

PUDARNYA EGALITARIANISME PADA ARSITEKTUR BALI AGA

Oleh:

I Putu Gede Suyoga

Dosen Sekolah Tinggi Desain Bali Denpasar

Email. gsuyoga@yahoo.com

ABSTRACT:

The architecture of Bali Aga is an artifact in Balinese civilization. The concept of social relation of kesamen as an egalitarian tradition of Bali Aga society, besides forming equality in social interaction, apparently also affect architectural spatial and building in Bali Aga villages. This study uses qualitative method with analytical descriptive approach and data collection with observation and documentation. Informant determination was done by purposive sampling. Data analysis is based on Gramsci's theory of domination and hegemony, as well as the theory of adaptation. The result of the research shows the form of building, spatial arrangement pattern, building material, and circulation system, have similarities between buildings with each other, so also in the layout of village settlements is relatively the same as applying linear pattern 'straight line' kaja-kelod with the center of communal activity in the center of the village. This uniformity was established for a long time, before it finally faded due to Bali Majapahit's cultural pressures in the Balinese period. The architectural identity struggle produces a new artifact of neo architecture Bali Aga as a Bali Aga hybrid architecture with Bali Majapahit who contribute in the area of Bali Aga villages. The results of architectural adaptation can be observed in architecture parhyangan, pawongan, public, and village spatial.

Keywords: egaliter, hegemony, adaptation, Bali Aga Architecture

I. PENDAHULUAN

Sejarah panjang perkembangan Arsitektur Tradisional Bali, dimulai dari zaman prasejarah, jaman Bali Kuno (zaman sebelum kedatangan dan setelah kedatangan Mpu Kuturan), zaman pengaruh Majapahit, sampai zaman modern. Bukti arkeologi menunjukkan pulau Bali sudah dihuni sejak era prasejarah dan sudah ada kontak dengan dunia luar sejak awal tarikh Masehi. Hal ini menyebabkan kebudayaan Bali berkembang dengan sejumlah adaptasi, sinkretisasi, akulturasi, bahkan inkulturasi sesuai zaman dan perkembangan masyarakat pendukung kebudayaan tersebut. Artefak 'benda budaya' dalam bentuk arsitektural di era Bali Kuno didukung oleh masyarakat masyarakat Bali Aga dan masyarakat Bali Mula. Pada era Bali Pertengahan atau era Majapahit dengan pengembangan konsepsi Hindu Jawa, dan selanjutnya era modern dengan masa kolonial, kemerdekaan, sampai memasuki posmodern saat ini.

Arsitektur Bali secara umum dapat di kelompokkan berdasarkan masyarakat pendukung kebudayaan Bali tersebut. Arsitektur Bali Aga didukung oleh masyarakat berkebudayaan Bali Aga (Bali Pegunungan). Nenek moyang orang Bali yang berasal dari keluarga besar Austronesia dan diperkirakan telah masuk ke Bali dua abad SM (Ir. Sri Mulono, 1978). Perkembangan berikutnya masuk imigran dari Jawa yang melahirkan tipe Arsitektur Bali Apanaga. Secara awam, desa-desa tempat kedua masyarakat ini tinggal, lebih dikenal dengan desa Bali Aga dan Desa Bali Apanaga.

Masyarakat Bali pendukung kebudayaan Bali Aga merupakan sebagian dari masyarakat Bali yang kurang atau tidak mendapat pengaruh dari kebudayaan Jawa-Majapahit dan agama Hindu Dharma (Danandjaja, 1985). Masyarakat Bali Aga berdomisili di daerah pegunungan serta pedalaman, karena itu dinamakan Aga yang dalam Kamus Bahasa Kawi artinya gunung.

Sembiran, Cempaga, Tigawasa, Trunyan, Pedawa, dan Pegringsingan merupakan beberapa desa yang didiami masyarakat Bali Aga. Desa-desanya tersebut berada di deretan pegunungan Kabupaten Buleleng, Bangli, dan Karangasem. Masyarakat Bali Aga atau Bali Mula disebut juga sebagai penduduk asli pulau Bali sebelum datangnya pengaruh kebudayaan Jawa-Majapahit yang kental benuansa Hindu Dharma (ajaran Hindu Nagari).

Interaksi sosial dalam masyarakat Bali Aga tidak mengenal struktur sosial yang berdasarkan wangsa. Sistem sosial dalam relasi personal dengan sesamanya disebut *kesamen*, yakni derajat yang sama satu dengan lainnya (Utama, 2015: 6). Istilah *kesamen* ini memiliki kesamaan arti dengan kata egaliter dalam terminologi sistem relasi sosial barat.

Tradisi egaliter ala Bali Aga ini menjadi dasar perikehidupan masyarakat dalam segala praktik sosio kultural keseharian. Artinya siapapun yang bertempat tinggal di daerah tersebut, disamakan derajatnya (*kesamen*), mereka tidak mengenal sistem hirarkhi layaknya sistem *wangsa*, yang juga berlaku pada ranah arsitektural, misalnya tata ruang dan bangunan rumah tinggal masyarakat sama semuanya.

Masuknya pengaruh Jawa melalui dominasi dan hegemoni pasca penaklukan oleh kerajaan Majapahit terhadap kerajaan Bali pada tahun 1343 M, menjadi titik awal terjadinya pergulatan identitas Bali Aga dengan Bali Majapahit. Dominasi sistem pemerintahan, simbol-simbol keagamaan, atau nilai-nilai yang dikandung mempengaruhi, dan bahkan membentuk struktur sosial, ekonomi, politik dan kebijakan publik, serta budaya, termasuk arsitektural.

Perang posisi ini rupanya terus berlanjut di medan perjuangan masa kemerdekaan era modern sampai kini memasuki posmodern. Artikulasi praktik agamaisasi ala Hindu Nagari melalui tubuh lembaga PHDI, dan perasaan terpinggirkan sebagai masyarakat kelas dua, telah memicu resistensi dengan gerakan *ngalih soroh* dan duplikasi konsep arsitektur Bali *Apanaga* (daratan) yang lebih benuansa Bali Majapahit. Singkatnya tampak

terjadi sejumlah perubahan konsep *kesamen* pada vitur arsitektural seperti penataan ruang, tampilan dan bahan bangunan yang tanpa disadari telah memicu pudarnya egalitarianisme arsitektur Bali Aga. Apa yang dimaksud egalitarianisme pada masyarakat Bali Aga? Bagaimana arsitektur Bali Aga memudar dan proses adaptasinya? menjadi sejumlah pertanyaan penelitian yang akan dijawab melalui ulasan artikel ini.

II. PEMBAHASAN

Guna menyamakan persepsi dalam memahami konten-konten istilah dalam konteks penulisan ini akan diuraikan terlebih dahulu batasan-batasannya.

2.1 Pengertian

Pemahaman konten egalitarianisme dalam judul artikel ini terkait konteks pembahasan Arsitektur Bali Aga, akan diuraikan sebagai berikut: Kata egalitarian merupakan bentukan kata egaliter. Kata egaliter berasal dari kata *égal* (Bahasa Perancis) yang berarti kesederajatan, kemudian berkembang menjadi kata sifat egalitarianisme yang diartikan seorang yang percaya bahwa semua orang sederajat (KBBI *on line*). Egalitarian yang diartikan sebagai bentuk pengakuan kesederajatan pada suatu masyarakat, berkembang menjadi sebuah paham universal yang secara singkat disebut egalitarianisme, seperti hal yang dapat dipahami pada tradisi lokal masyarakat Bali Aga.

Ciri dasar Arsitektur Bali Aga dapat dilihat pada tata ruang desa/permukiman, serta pada tata ruang dan bangunan huniannya. Penataan desa-desa Bali Aga termasuk dalam tipe penataan pola linier 'garis lurus'. Hal ini tidak terlepas dari adanya konsep *luan-teben* yang membentuk pola permukiman dengan konsep *rwa bhineda*, yakni *hulu* dan *teben* atau wilayah kepala dan kaki (Dwijendra, 2009: 9). Pola Arsitektur Bali Aga yang berdasarkan tradisi keagamaan lokal, mengalami sejumlah perubahan karena adanya adaptasi terhadap pengaruh luar (arsitektur dan ajaran keagamaan Bali Nagari), sehingga tampak memudar dari keasliannya.

Deskripsi di atas dalam terminologi semiotika mengarahkan pada pemahaman bahwa wujud fisik karya arsitektur Bali Aga sebagai penanda (bentuk) sekaligus dapat dibaca sebagai tanda (makna) budaya yang sedang dan sudah berkembang di tempat tersebut. Singkatnya, pudarnya Arsitektur Bali Aga sebagai teks sosial di tengah pengaruh arsitektur Bali daratan dan ajaran Hindu Bali Nagari tidak terlepas dari adaptasi serta pergeseran konsepsi yang melandasi rancang bangun karya arsitektur Bali tersebut.

2.2 Egalitarianisme dan Tantangannya pada Masyarakat Bali Aga

Paham egaliter dalam tradisi lokal masyarakat Bali Aga yang disebut juga masyarakat Bali Mula tampak pada konsep kesamaan derajat setiap orang yang dikenal dengan istilah *kesamen*. *Kesamen* diartikan siapapun yang bertempat tinggal di daerah tersebut disamakan derajatnya. Sifat abstraktif konsep *kesamen* kemudian dimaterialisasi dalam segala aspek kehidupan masyarakat Bali Aga. Pada tata sosial kemasyarakatan tidak dikenal hirarkhi, misalnya bahasa sehari-hari yang sama tata bahasanya antara orang tua dan anak-anak, jadi tidak mengenal tatanan *sor singgih basa* (cenderung menengah bahkan relatif kasar jika diukur dengan hirarkhi bahasa Bali daratan), sehingga tata pergaulannya menjadi luwes “*easy going*”. Wujud dari konsep *kesamen* ini pada bentukan fisik arsitektural dibangun dengan relatif sama.

Sistem keagamaan masyarakat Bali Aga dikategorikan sebagai kelompok agama historik oleh Utama (2015: 210), jika dilihat dari lima evolusi perkembangan agama yang disampaikan Bellah dalam Robertson (1986: 300), yakni tahap agama primitif, agama kuno (purbakala), agama historis, agama awal modern, dan agama modern. Dikatakan demikian karena praktik keagamaan yang dilakukan sejalan dengan tujuan utama agama historis adalah untuk mencapai keselamatan (*salvation*) dan tindakan religius terpenting dalam agama historis adalah tindakan untuk mempersiapkan jalan keselamatan, seperti dikatakan oleh Sanderson (2003: 522).

Keselamatan yang hendak dicapai masyarakat Bali Aga, bukan hanya ditunjukkan melalui tindakan religius yang dilaksanakan berkala secara musiman, tetapi juga tampak dalam praktik keagamaan dalam kehidupan sehari-hari, seperti *mabanten saiban*, *ngaturang canang*, bahkan termasuk *haturan* berupa kopi dan jajan dalam bentuk kecil, tampaknya hendak disuguhkan kepada seorang tamu, tetapi persembahan ini diletakkan di atas *dulang*. Sistem religi ini menunjukkan kepercayaan masyarakatnya kepada kekuatan gaib dan roh leluhur, dengan peran tokoh keagamaan seperti *Balian Desa*, *Kubayan*, *Jro Bahu*, *Penambing*, *Pengulung* dan istilah lokal lainnya, belum dikenal istilah *pemangku*.

Masyarakat Bali Aga sedikit sekali mendapat pengaruh kebudayaan Jawa Hindu dari Majapahit sehingga memiliki struktur sendiri. Orang-orang Bali Aga yang tidak mau tunduk kepada kekuasaan Majapahit di Bali pada umumnya mendiami desa-desa pegunungan seperti Sembiran, Sidatapa, Cempaga, Tigawasa, Pedawa di Kabupaten Buleleng, dan Tenganan Pegrisingan di Kabupaten Karangasem (Bagus, 2004: 286; Utama, 2015: 2).

Struktur hidup komunal dengan corak kebersamaan saling *ngopin* ‘membantu’, dalam aktivitas keseharian, pelaksanaan ritual, membuat rumah, dan kegiatan sosial budaya lainnya. Hubungan yang sejajar antara anggota masyarakat, karena tidak dikenal sistem kasta secara vertikal. Dwijendra (2009: 9) mencatat ada pengelompokan masyarakat menjadi dua bagian berdasarkan jenis kelamin, yaitu kasta laki-laki dan kasta perempuan. Utama (2015: 19, 23) mencatat, sistem kepemimpinan berdasarkan senioritas menurut perkawinan yang disebut *ulu apad* yakni berdasarkan catatan waktu perkawinan mereka. Setiap anggota masyarakat yang telah menikah, secara berjenjang nantinya pasti akan sampai pada struktur kepengurusan desa *pakraman* yang dipegang secara kolektif, dengan demikian masyarakat Bali Aga pada hakekatnya bersifat egaliter, pelapisan sosial yang ada atas dasar senioritas perkawinan.

Proses kerja intelektual organik dalam memperebutkan kepemimpinan moral dan

intelektual itulah oleh Gramsci disebut teori hegemoni. Menurut Mahadi Sugiono teori hegemoni Gramsci dibangun di atas premis, bahwa karena tidak mencukupinya kekuatan fisik belaka, maka diperlukan ide dalam melakukan kontrol politik. Tujuan ide adalah supaya yang dikuasai mematuhi penguasa, artinya tidak hanya harus merasa mempunyai dan menginternalisasikan nilai-nilai serta norma penguasa, tetapi juga harus memberikan persetujuan atas subordinasi mereka.

Budaya politik tradisional patrimonial muncul pada zaman kerajaan. Proses terjadinya ketika raja ingin mempertahankan kekuasaannya. Raja memerintahkan abadinya menciptakan budaya mitis dengan tujuan menciptakan kepatuhan rakyat. Agama, filsafat, seni, ilmu, mitos, dan bahasa yang datangnya dari kekuasaan Hindu Nagari, dibiarkan bertumpang tindih dengan budaya politik tradisional yang sudah ada di zaman pra sejarah. Dengan demikian, di permukaan budaya Bali tampak sangat Hinduistik, tetapi dibaliknya bersemayam budaya animistik dan dinamik. Pertumpangtindihan ini memudahkan raja membangun mitos dewa-raja (raja adalah dewa), kasta, dan sistem pelapisan sosial berbentuk arsitektural untuk tujuan melanggengkan kekuasaan.

Wijaya (2004: 299) melihat, mitos sejenis ini disosialisasikan melalui jaringan politik dan agama. Dalam politik, raja menempatkan putra-putranya yang telah dinikahkan dengan putri-putri penguasa lokal, diposisikan sebagai *gusti*, yang tunduk kepada pusat kekuasaan. Dalam agama, dibuatkan hubungan *siwa-siya* (guru-murid). Guru adalah para pendeta *brahmana* yang ditugaskan memimpin upacara sekaligus mempertahankan mitos-mitos yang dipatenkan dalam lontar-lontar. Jaringan politik dan religius ini ternyata efektif dan efisien untuk mempertahankan kekuasaan. Oleh karena itu pemerintah era kolonial dan juga republik memanfaatkannya dengan baik untuk menekan kelompok subordinat.

2.3 Adaptasi dan Pudarnya Arsitektur Bali Aga

Egalitarianisme pada arsitektur rumah tinggal masyarakat Bali Aga dipahami dari

bentuk, tata ruang dan bangunannya yang relatif sama antara rumah satu dengan rumah yang lainnya, demikian juga pada pola permukiman desa. Dwijendra (2009: 5) mengungkapkan bentuk rumah adatnya sama yakni berbentuk *bale tampul roras* 'rumah bertiang 12'. Ada juga istilah yang menyebut *bale tumpang talu* atau *bale gajah tumpang talu* atau juga disebut *bale samirata tumpang talu* (Suteja, 2011: 4). Dalam perjalanannya egalitarianisme dalam arsitektur ini mendapat tekanan tidak langsung akibat intervensi Negara melalui kemodernitasannya.

Intervensi Negara dengan program modernisasi (termasuk dalam bidang agama) dengan membawa ide-ide kesejagatan (universalisme) lewat aparatusnya, telah menimbulkan berbagai respon dari masyarakat lokal. Pendapat Bambang Trijono dalam bukunya *The Making of Ethnik & Religius Conflicts in Southeast Asia, Case and Ression* (2004), yang dikutip Utama (2015: 47-48) paling tidak mencatat empat respon adaptif dari sebuah masyarakat (etnik) dan agama lokal, yaitu: (1) akomodasi, (2) revitalisasi, (3) revivalisasi, dan (4) resistensi.

Respon akomodatif dipahami sebagai proses penerimaan pengaruh globalisasi bahkan secara ekstrem terserap ke dalam dinamika global. Praktik kultural dan sistem ekonomi kapitalis menjadi bagian dalam hidup keseharian. Selanjutnya respon revitalisasi terjadi bila masyarakat lokal tersebut menggunakan elemen modernisasi dan kapitalis untuk memperkuat dan merevitalisasi budaya dan identitas mereka. Sedangkan respon revivalisasi justru sebaliknya masyarakat lokal melawan pengaruh global dengan memperkuat tradisi keagamaan dan etnik mereka. Terakhir, resistensi merupakan bentuk respon penolakan secara utuh dengan melawan pengaruh modernitas dan masuknya model kapitalisme dalam proses produksi.

Pada era modern, berkat kemajuan zaman dan adanya sistem pendidikan yang semakin demokratis, keterbukaan media informasi, interaksi sosial karena perdagangan dan pekerjaan di luar desa, secara perlahan berpengaruh merubah pola pikir masyarakat Bali Aga. Modal

pendidikan seperti yang diungkap oleh Bourdieu tampaknya mempunyai peranan penting untuk mengubah struktur hegemoni kelas sosial tertentu terhadap kelas sosial lainnya yang pada gilirannya berpengaruh secara arsitektural.

a. Arsitektur *Parhyangan*

Sebelum kedatangan Mpu Kuturan di Bali, desa-desa di Bali menganut konsep *rwa bhineda*, dimana *palemahan* desa di bagi menjadi dua yaitu *luan* atau udik dan *tebenan* atau hilir. *Palemahan* desa ini membujur arah *kaja-kelod* (arah gunung dan laut). Pada ujung *kaja* (hulu desa) terletak pura Penataran sebagai hulu desa, sementara pada ujung *kelod* desa terletak pura Setra sebagai hilir desa (Ardana, dkk., 1982/1983: 143 dalam Utama, 2015: 109).

Secara spesifik perkembangan tempat pemujaan keluarga pada masyarakat Bali Aga, pada awalnya tata letaknya terdapat pada bangunan *bale saka roras*, yakni terletak pada bagian hulu (menyerupai *langgatan* ‘rak gantung’). Jadi tempat sucinya menjadi satu di dalam ruangan bangunan tempat tinggal mereka, tidak terpisah (tersendiri) di luar bangunan *bale saka roras*.

Perkembangan selanjutnya masyarakat Bali Aga mulai membuat *pelinggih* atau bangunan suci terpisah dengan *bale saka roras*. Bangunan suci dengan menggunakan cabang pohon *dapdap* (kayu sakti) atau dikenal dengan istilah *turus lumbung* yang di tanam di *luan* pekarangan. Bangunan suci *turus lumbung* ini terdiri dari *pelinggih rong tiga*, *taksu*, dan *penglurah*. Perkembangan pada level yang lebih luas, terlihat pada bangunan suci milik kelompok klan berupa pura *dadia*, bentuk bangunan suci mulai mengadopsi bentuk-bentuk *pelinggih* berupa *meru*, *gedong ibu*, dan *padma*. Jika dirunut rupanya bentuk bangunan suci ini diadopsi dari ajaran-ajaran Hindu (Agama Hindu Nagari).

Lontar *Ithi Prakerti* karangan Mpu Kuturan mengungkapkan bahwa pada sebuah keluarga batih (inti) agar tempat suci *sangghah* atau *merajan alit* dilengkapi bangunan suci atau *pelinggih* “*tri lingga*” (*kemulan*, *taksu*, dan *penglurah*). Pada tata ruang yang lebih besar misalnya *merajan*

madia dengan jajar *pelinggih* “*panca lingga*” (jajar *tri lingga*, ditambah *gedong sari tumpang dua* dan *pepelik sari/pengaruman*), pada *Merajan Utamaning Madia* dengan jajar *pelinggih* “*sapta lingga*”, *Merajan Gede*, *Panti/Dadia/Paibon*, dan di Pura lainnya dengan jajar *pelinggih* “*eka dasa lingga*” sebanyak sebelas *pelinggih* yang lengkap dengan *padma* (Soebandi, 2008: 41).

Jika mengacu pemikiran Foucault tentang relasi kuasa dan pengetahuan serta kuasa disiplin, maka uraian lontar ini menunjukkan pengembangan *pelinggih* masyarakat Bali Aga rupanya atas kuasa pengetahuan dalam lontar *Ithi Prakerti* tersebut. Kaum intelektual organik era Bali Kuno menangkap kuasa pengetahuan dalam lontar tersebut kemudian mendisiplinkan masyarakat Bali Aga yang merupakan rakyat kerajaan Bali masa pemerintahan Prabu Dharmodayana bersama permaisurinya Gunapriyadharmapatni (putri raja Singosari dari Jawa Timur). Mpu Kuturan diundang ke Bali untuk menata keagamaan yang sedang kacau karena pertikaian antar sekte yang ada di Bali saat itu, seperti catatan Goris (1974). Konsep penyatuan yang dikembangkan oleh Mpu Kuturan adalah mengkonstruksi ajaran Hindu yang berkembang di Bali melalui ajaran *Tri Murti* dengan bentuk arsitektural *pelinggih kemulan* di tataran rumah tangga dan *Kahyangan Tiga* (Pura Desa, Puseh dan Dalem) di tataran *desa pakraman* atau desa adat.

Konsep lainnya yang juga monumental dalam lembaga *desa pakraman* dengan menjadikan konsep ruang *Tri Mandala* (*utama*, *madya* dan *nista mandala*) dan konsep *Tri Hita Karana* sebagai landasan dalam menata kehidupan umat Hindu (Nikanaya, 2008: 3). *Tri Hita Karana* ‘tiga penyebab kesejahteraan’ yakni melalui harmoni hubungan manusia dengan Tuhan (*parhyangan*), harmoni hubungan manusia dengan manusia (*pawongan*), dan selarasnya hubungan manusia dengan alam semesta (*palemahan*). Pada hakekatnya konsep ini menganjurkan pemahaman harmoni universal bagi semua makhluk dan alam semesta. Konsep ini tercatat sebagai dasar pola dan tata ruang permukiman sebuah *desa pakraman* atau *desa adat* yang dikembangkan oleh Mpu

Kuturan (1000 M) pada masa pemerintahan raja Sri Dharma Udayana Warmadewa (991-1018) di Bali Nagari.

Kuasa pengetahuan dalam konsep ini kemudian mendisiplinkan umat Hindu Bali yang awalnya terbagi dalam sekte-sekte keagamaan untuk bersatu, taat dan patuh menjalankan keputusan dalam satu artikulasi tata keagamaan *Tri Murti* dengan kelengkapan elemen arsitektur *parhyangan* tersebut. Disiplin tubuh umat Hindu yang berjalan mapan cukup lama di masyarakat Bali juga menguasai keyakinan masyarakat Bali Aga yang memang sudah menyembah leluhur sejak awal (meskipun tidak semua desa Bali Aga mentaatinya).

Penguasaan secara halus dan bahkan tidak terasa ini dalam pandangan Gramsci disebut hegemoni. Hegemoni semakin terasa saat masyarakat Bali Aga kemudian secara mandiri dan akhirnya merasa ada yang kurang apabila tidak mendirikan *pelinggih kemulan* atau *sanggah rong tiga* di *sanggah* rumah mereka. *Sanggah* dengan *pelinggih trilingga* kemudian menjadi habitus masyarakat Bali Aga, namun pada sisi lain habitus baru ini telah berimplikasi memudarkan habitus lama yakni tempat suci di bagian hulu dalam ruangan *bale saka roras*.

Kondisi ini dalam perspektif pemikiran Foucault dipahami bahwa dengan diterimanya sebuah artikulasi baru, yakni tempat suci keluarga yang dibangun terpisah di halaman rumah dan dengan jajar *pelinggih trilingga*, maka secara otomatis ia telah meniadakan artikulasi sebelumnya, yakni *pepaga* sebagai tempat suci di dalam *bale saka roras* mereka. Maka, artikulasi baru ini telah memudarkan salah satu elemen arsitektur rumah tinggal masyarakat Bali Aga melalui respon akomodatif.

Masuknya ajaran agama Hindu Nagari dapat juga dilihat dalam kerangka memperkuat “mempermulia” sistem keyakinan masyarakat Bali Aga yang telah berkembang sebelumnya. Jadi terjadi proses revitalisasi yang akulturatif. Proses akulturasi terjadi melalui perluluan aspek lokalitas dengan budaya luar dalam posisi yang dapat dikatakan seimbang. Namun ada kalanya

aspek lokalitas menjadi tenggelam ketika proses akulturasi terjadi. Jika dilihat dasarnya setiap budaya dapat mempengaruhi budaya lainnya secara timbal balik, namun dalam praktiknya, budaya yang satu cenderung menguasai budaya lain, dan akhirnya menggiring ke arah perbedaan antara kelompok dominan dan kelompok berakulturasi. Hal ini sejalan dengan pemikiran Gramsci tentang hegemoni, kesepakatan mereka telah direbut melalui pertukaran sosial yang rasional sehingga kecil kemungkinannya terjadi penolakan dalam tingkat kesadaran. Mengingat tanpa disadari mereka telah masuk ke dalam struktur kekuasaan kelompok dominan sehingga mereka dengan suka rela menerima pengaruh kelompok hegemonik.

Peran aktor intelektual organik dalam pandangan Gramsci (Simon, 2004: 144) di interen masyarakat Bali Aga yakni tokoh elit desa “*ulu apad*”, balian desa/pemangku desa, dan pengurus banjar dinas serta elit politik (partai) era kemerdekaan, juga ikut andil dalam reproduksi dan disposisi kuasa pengetahuan keagamaan maupun politik yang disampaikan pemerintah melalui lembaga tertinggi umat Hindu yakni Jawatan Agama dan pengurus Parisada Kabupaten melalui kursus-kursus dan buku-buku agama. Respon akomodatif sejumlah elite desa ini merasa memiliki otoritas untuk melakukan pembenahan dalam bidang keagamaan.

Sejumlah modal yang dimiliki elite desa ini dalam pandangan Bourdieu berupa modal simbolik, ditambah modal budaya, dan modal sosial, tentunya juga modal ekonomi (Lubis, 2014: 109), dalam hal ini berupa ketokohan/senioritas, pengetahuan intelektual (pendidikan), relasi, dan tentunya juga kekayaan, telah memberi peluang dan sangat mendukung dalam upaya menerapkan ajaran-ajaran agama (Hindu Nagari) yang diperolehnya melalui diskusi-diskusi agama untuk diterapkan di desanya. Pada saat itu mulailah muncul bangunan-bangunan suci seperti *meru*, *menjangan seluang*, *gedong ibu*, dan *padmasana* dalam pura pemujaan kelompok *dadia* (tempat suci klen tertentu). Bentuk-bentuk *pelinggih* ini merupakan hasil akomodasi masyarakat Bali Aga dari agama Hindu Nagari secara evolutif dan berkelanjutan.

b. Arsitektur *Pawongan*

Konsep *Tri Murti*, *Tri Mandala*, *Tri Hita Karana* merupakan wacana-wacana dalam rangka penataan sosial dan religi masyarakat Bali yang dikonstruksi oleh Mpu Kuturan pada masa raja Sri Dharma Udayana Warmadewa (991-1018) berkuasa di Bali Nagari. Relasi kuasa pengetahuan di balik wacana-wacana ini selanjutnya berimplikasi pada tata ruang dan bangunan tempat suci (arsitektur *parhyangan*) dan juga hunian (arsitektur *pawongan*). Hal ini sesuai dengan pemikiran Foucault yang menyatakan bahwa kekuasaan dilaksanakan agar suatu wacana terwujud (Lubis, 2014: 85). Jadi wacana-wacana tersebut di atas merupakan pengetahuan yang tersebar pada masyarakat di seluruh wilayah kekuasaan raja suami istri tersebut, termasuk di masyarakat Bali Aga yang tinggal di pegunungan.

Kesamen sebagai konsep egaliter masyarakat Bali Aga merupakan wacana yang kuat dalam relasi sosial dan sangat kuat pengaruhnya dalam praktik kultural termasuk karya arsitektur. Pergaulan masyarakat Bali Aga dengan masyarakat Bali Nagari menyadarkan mereka akan adanya perbedaan dalam sistem sosial antara Bali Aga dengan Bali Nagari. Perbedaan ini secara teoritis disebut deprivasi relatif. Deprivasi relatif adalah suatu keadaan yang dirasakan oleh orang dan/atau sekelompok orang yang merasa kehilangan atau tercerabut dari orang lain dan juga dari kondisi atau situasinya. Dapat juga berarti orang merasa tersingkirkan dari orang lain atau kondisi mereka lebih buruk dari kondisi orang lain. Perasaan orang atau perilaku yang muncul dari perasaan itu mungkin menimbulkan tindakan yang mengejutkan (Outhwaite, ed., 2008: 728-729; Utama, 2015: 187).

Pengklasifikasian masyarakat Bali atas kategori Bali Aga dengan Bali Majapahit sebenarnya merupakan warisan zaman kerajaan dahulu. Sistem pelapisan sosial masyarakat Hindu ini masih terasa sampai saat ini akibat konstruksi sosial yang dilakukan oleh penguasa. Penelusuran pustaka menunjukkan, bahwa sebelum era Majapahit di Bali, tampaknya sistem kasta tidak diterapkan secara tajam dan rumit. Gelar-gelar

kebangsawanan (*ksatria*) sangat sederhana dan tidak banyak jenisnya. Gelar kebangsawanan yang digunakan pada era itu seperti *Ki*, *Pengeran* atau *Rakriyan*. Sementara gelar kaum *brahmana* hanya dibedakan atas dua jenis, yakni *Dang Acarya* untuk pendeta aliran *Siwa* dan *Dang Upadiaya* untuk yang beraliran *Buda* (Diantha dan Wisanjaya, 2010: 56-57).

Konsep-konsep keagamaan seperti pelapisan sosial berdasarkan profesi (*catur warna*) telah berkembang menjadi pelapisan sosial berdasarkan keturunan (*catur wangsa*). Pelapisan sosial masyarakat Hindu era kerajaan ke dalam kasta, yaitu *brahmana*, *ksatria*, *wesia*, dan *sudra* dengan tegas mulai disebutkan dalam piagam-piagam raja Anak Wungsu (1049-1077 M).

Sistem pelapisan sosial menurut *warna* itu ternyata diabaikan dalam rangka tatanan sosio religius baru di era pemerintahan raja-raja Gelgel, bahkan konsep *warna* telah berubah menjadi *wangsa* yang mendudukan orang Bali Aga sebagai orang taklukan. Tentu saja statusnya lebih rendah dari orang Bali Majapahit. Masyarakat Bali Aga mengalami deprivasi relatif, mereka merasa menjadi masyarakat pinggiran karena tinggal di pegunungan dan juga merasa menduduki posisi sebagai masyarakat kelas dua. Inilah stigma negatif yang mereka rasakan.

Faktor resistensi terhadap stigma tersebut, memicu terjadinya gerakan *ngalih soroh* ‘menelusuri *kawitan* atau leluhur’, yang berimplikasi pada pudarnya konsep *kesamen* ‘kesederajatan’ masyarakat Bali Aga. Sebagian masyarakat Bali Aga telah terkotak-kotak dalam kelompok *wangsa/soroh/klan*, seperti halnya masyarakat Bali Nagari yang bernuansa budaya Jawa Majapahit. Anggota kelompok *soroh* Bali Aga ini merasa lebih percaya diri dan merasa setara derajatnya dengan masyarakat Bali Nagari. Implikasi gerakan *ngalih soroh* di masyarakat Bali Aga secara arsitektur berpengaruh pada tata bangunan dan jumlah *pelinggih* di *pura dadia* yang semakin banyak (pembangunannya mengacu lontar *Ithi Prakerti* dan *Bhisama* kewangsaan masing-masing).

Bangunan tempat tinggal masyarakat Bali Aga juga terjadi perubahan bahan, bentuk, bahkan penataan ruang dan jumlah massa bangunannya. Penggunaan material bangunan modern, seperti penutup lantai tegel/keramik, dinding batako, seng/genteng, penyelesaian dengan cat atau pewarnaan dinding, kusen, dan ragam hias. Perkembangan pola tata bangunan *bale saka roras* dengan tambahan satu unit tempat suci keluarga/*sanggah* pada bagian hulu, *bale saka roras* pada zona *madya* ‘tengah’ dan tambahan bangunan penunjang pada area *nista*.

c. Arsitektur Publik

Arsitektur *publik* merupakan segala bangunan yang berfungsi sosial untuk aktivitas umum kemasyarakatan di desa Bali Aga. Pada awalnya bangunan fasilitas bersama berbentuk plaza dan *bale banjar* atau wantilan kayu untuk kegiatan pasar desa, paruman adat, ritual juga atraksi seni musiman, atau sekedar tempat bercengkrama (ngobrol, adu ayam jago, dan minum *tuak*).

Setelah perkembangan dan berinteraksi dengan Bali Nagari lebih-lebih setelah kemerdekaan, fasilitas umum juga bertambah dengan dibangunnya gedung sekolah, tempat olah raga bulu tangkis yang berbentuk bangunan kekantoran dan wantilan beton, termasuk juga fasilitas kunjungan wisata (“bangunan contoh” rumah tradisional asli), toko, dan toilet umum.

Kontestasi bangunan tradisional Bali Aga dengan bangunan semi modern dan bangunan modern “kekantoran” merupakan penanda pudarnya egalitarianisme dalam heterogenya bentukan arsitektural di wilayah desa-desa Bali Aga. Secara umum pasti mempengaruhi tata ruang desa Bali Aga.

III. PENUTUP

Egaliter yang dipahami sebagai kesederajatan dalam konsep masyarakat Bali Aga dikenal dengan istilah “kesamen”. *Kesamen* kemudian memberi ruang kesamaan derajat, hak dan kewajiban bagi siapa saja yang tinggal di wilayah desa Bali Aga. Senioritas waktu pernikahanlah yang menjadikan

kesempatan memimpin menjadi ketua desa yakni sebagai anggota kelompok *ulu apad*, sehingga posisi ini pasti dicapai oleh setiap keluarga. *Kesamen* sebagai sebuah dasar relasi sosio kultural juga terimplikasi ke wujud arsitektural. Bentuk, bahan bangunan, pola ruang dan tata bangunan *bale saka roras* dalam sebuah lahan pekarangan warga Bali Aga relatif sama antara satu dengan lainnya. Demikian juga tempat suci keluarga bertempat di bagian *hulu* di dalam *bale saka roras* ini. Hal inilah yang kemudian mendapat hegemoni kuasa raja-raja era Bali Kuno dan era Bali Pertengahan setelah Bali berada di bawah kuasa Majapahit. Kondisi ini rupanya masih terus berlanjut pada era kolonial dan setelah kemerdekaan.

Gejala pudarnya egalitarianisme dalam ranah arsitektur Bali Aga tidak dapat dilepaskan dari pergerakan orientasi keagamaan Hindu Nagari yang berbasis Jawa. Berawal dari relasi kuasa pengetahuan dalam konsep *Tri Murti* masa Mpu Kuturan dengan materialisasi ke artefak *pelinggih kemulan* di tingkat rumah tangga dan Pura *Kahyangan Tiga* di setiap *desa pakraman/adat*, kemudian memicu pendirian *sanggah* (arsitektur *parhyangan*) terpisah dari *bale saka roras*. Pola tata ruang rumah Bali Aga (arsitektur *pawongan*) ada yang berubah menjadi zona *sanggah* di hulu lahan, *bale saka roras* di zona *madya* ‘tengah’ lahan, dan bangunan penunjang di zona *teben* ‘bawah’ lahan pekarangan.

Pudarnya egalitarianisme pada arsitektur *parhyangan* juga tampak dari pendirian pura dadia milik kelompok klan tertentu yang mengacu *bhisama kewangsaan* yang mengikuti bentuk dan jenis *pelinggih*, pola penataan bangunan pura Bali Nagari. Sebuah karya arsitektur yang lahir dari adanya gerakan *ngalih soroh* (penelusuran klen) sebagian masyarakat Bali Aga yang merasa rendah diri akibat tekanan stigma negatif disebut sebagai masyarakat kelas dua dalam kancah pergaulannya dengan masyarakat Bali Nagari.

Pudarnya egalitarianisme berikutnya juga tampak dengan kehadiran arsitektur publik sebagai bangunan fasilitas umum dan pariwisata di wilayah desa Bali Aga. Kontestasi arsitektural pun tak dapat dihindari antara bangunan yang

menjunjung konsep tradisi egaliter kelokalan Bali Aga, dengan sejumlah bangunan *kekantoran* yang menjunjung konsep modern dan universalitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Dwijendra, N.K.A. 2009. *Arsitektur dan Kebudayaan Bali Kuno*. Denpasar: Udayana Press.
- Bagus, I Gusti Ngurah. 2004. *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Diantha, Made Pasek dan I Gede Pasek Eka Wisanjaya. 2010. *Kasta Dalam Perspektif Hukum dan Ham*. Denpasar: Udayana University Press bekerjasama dengan CV. Bli Media Adhikarsa.
- Goris, R. 1974. *Sekte-sekte di Bali*. Jakarta: Bhatara.
- Lubis, Akhyar Yusuf. 2004. *Setelah Kebenaran dan Kepastian Dihancurkan Masih Adakah Tempat Berpijak Bagi Ilmuwan*. Bogor: Akademia.
- _____. 2014. *Postmodernisme Teori dan Metode*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nikanaya, I Nyoman. 2008. *Pedoman dan Kriteria Penilaian Desa Pakraman/Desa Adat*. Denpasar: Dinas Kebudayaan Provinsi Bali.
- Simon, Roger. 2004. *Gagasan-Gagasan Politik Gramsci*. Terjem. Kamdani dan Imam Baehaqi. Yogyakarta: Insist bekerjasama dengan Pustaka Pelajar.
- Soebandi, Ktut. 2008. *Riwayat Merajan di Bali*. Denpasar: CV. Kayumas Agung.
- Suteja, I Made Dharma. 2011. *Arsitektur Tradisional Bali Aga di Bali*. Denpasar: Cakra Press.
- Utama, I Wayan Budi. 2015. *Wajah Bali Tanpa Kasta: Pudarnya Identitas Bali Aga*. Tabanan: Pustaka Ekspresi.
- Wijaya, I Nyoman. 2004. "Pemilu 2004: Sebuah Analisis Semesta Simbolis" dalam *Politik Kebudayaan dan Identitas Etnik*. Ed. I Wayan Ardika dan Darma Putra. Denpasar: Fakultas Sastra Universitas Udayana bekerjasama dengan Balimangsi Press.